

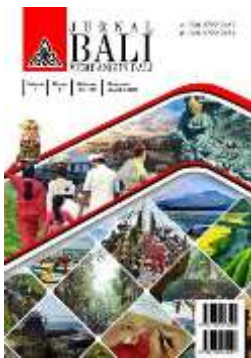


Paradoks Transformasi Digital UMKM Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali: Menuju Kerangka Kebijakan Berbasis Profil Kesiapan Digital

Ida Ayu Mirah Pertiwi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

email: ia.mirahpertiwi@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Juni 2026

Direvisi pada
6 Juli 2026

Disetujui pada
27 Juli 2026

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali melalui identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat adopsi teknologi digital serta menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan yang telah berjalan. Penelitian ini juga mengusulkan Model Transformasi Digital UMKM Berbasis Profil Kesiapan Digital sebagai kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam mendukung percepatan digitalisasi UMKM.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) berdasarkan analisis data sekunder. Data diperoleh dari laporan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, data statistik, dan artikel berita yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk merumuskan kerangka kebijakan transformasi digital UMKM.

Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali masih menghadapi paradoks antara besarnya potensi ekonomi kreatif dengan rendahnya tingkat adopsi teknologi digital. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pendampingan, serta pendekatan kebijakan yang masih bersifat seragam menjadi faktor yang berkontribusi memengaruhi rendahnya transformasi digital.

Implikasi: Penelitian ini menegaskan bahwa percepatan transformasi digital UMKM memerlukan perubahan desain kebijakan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan digital masing-masing pelaku usaha. Kerangka kebijakan yang diusulkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program digitalisasi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kata Kunci: transformasi digital; UMKM; ekonomi kreatif; desain kebijakan; profil kesiapan digital.

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the paradox of digital transformation among creative economy MSMEs in Bali Province by identifying the factors contributing to the low level of digital technology adoption and examining the existing policy implementation gaps. Furthermore, this study proposes a Digital Readiness Profile-Based MSME Digital Transformation Model as an adaptive policy framework to accelerate MSME digitalization.

Research methods: This study employed a qualitative approach using a literature review (*library research*) based on secondary data analysis. The data were collected from government reports, policy documents, statistical publications, scholarly articles, and credible online news sources. Data were analyzed



descriptively through identification, interpretation, and synthesis to formulate a conceptual policy framework for MSME digital transformation.

Results and discussion: The findings reveal a paradox in the digital transformation of creative economy MSMEs in Bali, characterized by the coexistence of significant creative economic potential and a relatively low level of digital technology adoption. Low digital literacy, limited human resource capacity, inadequate mentoring, and a uniform policy approach were identified as the main factors hindering digital transformation.

Implication: The study highlights the importance of shifting from a one-size-fits-all policy approach toward a more adaptive policy design that considers the varying levels of digital readiness among MSMEs. The proposed framework is expected to support governments in developing more targeted, effective, and evidence-based digital transformation policies.

Keywords: digital transformation; MSMEs; creative economy; policy design; digital readiness profile.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan ekonomi, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi, memasarkan, dan mengonsumsi barang maupun jasa. Transformasi tersebut sebenarnya telah berlangsung seiring dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0, sementara pandemi Covid-19 kemudian mempercepat proses adaptasi terhadap teknologi digital. Ayupijaya (2021) menunjukkan bahwa pandemi turut mempercepat transformasi yang sebelumnya telah berlangsung, dengan mendorong masyarakat beradaptasi terhadap pola kehidupan dan dunia kerja baru berbasis teknologi digital. Kondisi tersebut semakin mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam aktivitas bisnis guna meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing. Dengan demikian, transformasi digital tidak lagi sekadar dipandang sebagai inovasi, tetapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, transformasi digital memiliki arti penting karena berkaitan erat dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor usaha, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan. Salah satu sektor yang memperoleh perhatian besar dalam agenda transformasi digital adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk mempercepat digitalisasi UMKM agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi perubahan perilaku pasar yang semakin bergantung pada teknologi digital. Meskipun berbagai program strategis telah diluncurkan pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM, implementasinya masih menghadapi berbagai

tantangan. Studi Hapiz *et al.* (2025) menunjukkan bahwa kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasi masih menjadi persoalan utama. Rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur digital, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan menjadi hambatan yang menyebabkan transformasi digital UMKM belum berjalan secara optimal.

Transformasi digital memberikan berbagai peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pemanfaatan media sosial, *marketplace*, sistem pembayaran digital, hingga aplikasi pembukuan memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Digitalisasi juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai nilai yang lebih luas tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, proses digitalisasi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya intervensi kebijakan yang mendukung transformasi digital (Angraini *et al.*, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan pendukung yang memungkinkan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal serupa terlihat dalam implementasi digitalisasi pada sektor publik. Alicia *et al.* (2026) menunjukkan bahwa penerapan e-Katalog di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, meskipun mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sistem atau teknologi digital tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan proses transformasi. Kesiapan pengguna dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas implementasi teknologi. Oleh karena itu, transformasi digital memerlukan pendekatan kebijakan yang mampu menjangkau karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha secara lebih merata. Sejalan dengan itu, Ramadhany *et al.* (2026) menegaskan bahwa transformasi digital memerlukan pendekatan kebijakan yang inklusif agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha tanpa menimbulkan kesenjangan digital di berbagai daerah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan

transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh jumlah program dan teknologi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan intervensi dengan kondisi dan kapasitas kelompok sasaran.

Salah satu sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan transformasi digital adalah sektor ekonomi kreatif. Dalam konteks Bali, aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif berkembang dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal serta karakteristik wilayah masing-masing. Sumartana *et al.* (2024), misalnya, menunjukkan pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Klungkung melalui inovasi produk *Virgin Coconut Oil* (VCO). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa UMKM di Bali memiliki karakteristik usaha dan potensi pengembangan yang beragam, sehingga pendekatan pengembangan usaha tidak dapat sepenuhnya diseragamkan. Karakteristik ekonomi kreatif yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan pengetahuan sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi menjadikan teknologi digital sebagai instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat memperluas pemasaran, memperkuat identitas merek (*branding*), meningkatkan interaksi dengan konsumen, hingga mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi kreatif pada dasarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya tingkat adopsi teknologi digital.

Namun demikian, perkembangan ekonomi kreatif tidak selalu berjalan beriringan dengan transformasi digital. Berbagai laporan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital, baik karena rendahnya literasi digital, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap teknologi, maupun belum optimalnya ekosistem pendukung transformasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha, kualitas pendampingan, serta efektivitas kebijakan yang mendukung proses perubahan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dirancang untuk menjawab kompleksitas permasalahan tersebut. Agussetianingsih & Kasim (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas desain kebijakan yang mampu mengintegrasikan tujuan, teori kausal, instrumen, target kebijakan, serta proses implementasi secara komprehensif. Dengan demikian, transformasi digital memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan program, tetapi

juga pada kesesuaian antara karakteristik permasalahan dengan bentuk intervensi yang diterapkan.

Fenomena tersebut tampak jelas di Provinsi Bali. Sebagai daerah yang dikenal memiliki kekayaan budaya, seni, dan pariwisata, Bali juga memiliki perkembangan sektor ekonomi kreatif yang cukup pesat. Berbagai subsektor seperti kriya, kuliner, fesyen, seni pertunjukan, fotografi, dan desain tumbuh sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, perkembangan ekonomi kreatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat transformasi digital yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi kreatif dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi pengembangan usaha.

Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dipahami sebagai paradoks transformasi digital, yaitu situasi ketika suatu daerah memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, tetapi tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku usahanya masih relatif rendah. Paradoks tersebut menunjukkan bahwa persoalan transformasi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan adopsi teknologi, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan yang mengatur bagaimana proses transformasi digital dilaksanakan. Dengan kata lain, rendahnya tingkat digitalisasi tidak hanya mencerminkan keterbatasan pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pentingnya transformasi digital UMKM serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, sebagian besar kajian masih berfokus pada identifikasi hambatan maupun evaluasi implementasi program digitalisasi. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengaitkan paradoks transformasi digital dengan desain kebijakan yang mempertimbangkan tingkat kesiapan digital pelaku UMKM masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan tingkat kesiapan digital berpotensi memengaruhi efektivitas intervensi kebijakan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan penyebab rendahnya transformasi digital, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat adopsi teknologi digital serta menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan yang telah berjalan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada

identifikasi hambatan atau evaluasi program digitalisasi, penelitian ini menawarkan Model Transformasi Digital UMKM Berbasis Profil Kesiapan Digital sebagai kerangka konseptual yang menempatkan tingkat kesiapan digital pelaku usaha sebagai dasar dalam penyusunan strategi intervensi dan evaluasi kebijakan. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam mendukung percepatan transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis fenomena transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam kondisi alamiah dengan menekankan proses interpretasi terhadap data serta pemaknaan dibandingkan generalisasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan transformasi digital UMKM melalui analisis terhadap berbagai dokumen yang telah dipublikasikan.

Metode studi literatur digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada sintesis berbagai informasi yang telah tersedia untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan (*policy gap*), serta merumuskan model kebijakan yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi transformasi digital UMKM, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik analisis dokumen (*document analysis*). Dokumen yang dianalisis meliputi laporan resmi pemerintah, publikasi instansi pemerintah, data statistik, dokumen kebijakan, artikel berita daring dari media yang kredibel, serta berbagai publikasi lain yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan transformasi digital di Provinsi Bali. Penggunaan berbagai jenis dokumen tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi eksisting, tantangan, serta berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong transformasi digital UMKM.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, reduksi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai informasi yang diperoleh. Tahap pertama adalah identifikasi isu, yaitu menginventarisasi berbagai fenomena dan

permasalahan yang berkaitan dengan transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif berdasarkan data sekunder yang tersedia. Tahap kedua adalah analisis permasalahan, yaitu mengkaji keterkaitan antara kondisi eksisting, faktor-faktor penyebab, serta kesenjangan implementasi kebijakan yang terjadi. Tahap ketiga adalah perumusan model kebijakan, yaitu menyusun model transformasi digital berbasis Profil Kesiapan Digital UMKM sebagai hasil sintesis dari berbagai temuan yang diperoleh selama proses analisis.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai kondisi transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali, tetapi juga menawarkan Model Transformasi Digital UMKM Berbasis Profil Kesiapan Digital sebagai kerangka kebijakan yang diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Model yang diusulkan merupakan hasil sintesis konseptual berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen dan data sekunder sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris maupun pengembangan kebijakan pada tahap selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Transformasi Digital UMKM Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali

Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi kreatif yang sangat dipengaruhi oleh kekayaan budaya, seni, dan sektor pariwisata. Karakteristik tersebut mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas usaha yang memanfaatkan kreativitas sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Perkembangan ekonomi kreatif di Bali tidak hanya menjadi penunjang sektor pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai subsektor, seperti kriya, kuliner, fesyen, fotografi, seni pertunjukan, desain, dan subsektor kreatif lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya Bali melalui berbagai produk dan jasa kreatif yang dihasilkan.

Berdasarkan pendataan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023, terdapat 4.998 usaha ekonomi kreatif yang tersebar pada 17 subsektor. Subsektor kriya menjadi subsektor dengan jumlah pelaku usaha terbanyak, yaitu sebanyak 3.745 usaha, diikuti oleh subsektor kuliner sebanyak 298 usaha, fotografi sebanyak 230 usaha, seni pertunjukan sebanyak 160 usaha, dan fesyen sebanyak 159 usaha. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif telah berkembang dalam berbagai bidang usaha

dengan karakteristik yang beragam serta memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Keragaman subsektor tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Bali tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha, tetapi tersebar pada berbagai aktivitas ekonomi yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan daya saing daerah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Besarnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki modal ekonomi yang kuat untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, membangun identitas merek (*branding*), serta menjangkau konsumen tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM sektor ekonomi kreatif di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi kreatif yang cukup pesat seharusnya dapat menjadi fondasi bagi percepatan adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi kreatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat adopsi teknologi digital yang memadai. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali (2023), jumlah UMKM di Bali mencapai sekitar 448.434 unit usaha, namun baru sekitar 34% yang telah berhasil melakukan *onboarding* ke dalam ekosistem digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan aktivitas usahanya melalui pola-pola konvensional sehingga pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran, transaksi, maupun pengelolaan usaha belum dilakukan secara optimal. Data tersebut memperlihatkan bahwa besarnya jumlah pelaku usaha belum secara otomatis diikuti oleh tingginya tingkat adopsi teknologi digital, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong percepatan transformasi digital di tingkat UMKM.

Potret tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi kreatif dengan tingkat transformasi digital yang dicapai oleh UMKM di Provinsi Bali. Di satu sisi, Bali memiliki jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang besar dengan keragaman subsektor yang menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi maupun banyaknya pelaku usaha, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan dirancang untuk menjawab karakteristik permasalahan yang

dihadapi. Linder & Peters (1984) menegaskan bahwa analisis kebijakan selama ini lebih banyak memberikan perhatian pada identifikasi permasalahan dibandingkan proses perancangan solusi kebijakan, padahal desain kebijakan memerlukan proses yang sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik masalah, tujuan, dan instrumen kebijakan. Dengan demikian, potret transformasi digital UMKM di Bali tidak hanya menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan capaian digitalisasi, tetapi juga mengisyaratkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik dan tingkat kesiapan digital pelaku UMKM.

Analisis Paradoks Transformasi Digital UMKM Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi Bali

Potret transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi kreatif dengan tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, rendahnya tingkat digitalisasi UMKM perlu dipahami sebagai persoalan yang melibatkan aspek sumber daya manusia, kesiapan pelaku usaha, dukungan ekosistem, serta efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, paradoks transformasi digital di Bali tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Paradoks tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan transformasi digital tidak cukup dipahami hanya melalui identifikasi berbagai faktor penyebabnya, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dirancang untuk merespons kompleksitas permasalahan tersebut. Linder & Peters (1984) menjelaskan bahwa analisis kebijakan selama ini lebih banyak memberikan perhatian pada proses mengidentifikasi masalah dibandingkan proses perancangan solusi kebijakan. Padahal, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara karakteristik permasalahan, tujuan kebijakan, serta instrumen yang digunakan dalam proses implementasinya. Dengan demikian, rendahnya tingkat transformasi digital UMKM di Provinsi Bali perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan rendahnya adopsi teknologi, tetapi juga sebagai persoalan desain kebijakan yang belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik pelaku usaha.

Paradoks tersebut juga dapat dipahami dari perspektif instrumen kebijakan. Schneider & Ingram (1990) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya dirancang untuk mendorong masyarakat melakukan tindakan yang sebelumnya

mungkin tidak dilakukan, melalui berbagai instrumen kebijakan yang dibangun atas asumsi tertentu mengenai perilaku kelompok sasaran. Oleh karena itu, efektivitas transformasi digital tidak hanya bergantung pada tersedianya teknologi, tetapi juga pada kesesuaian instrumen kebijakan dengan karakteristik pelaku UMKM.

Salah satu faktor yang paling banyak disoroti adalah rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Handayani (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai manfaat teknologi dan literasi digital yang belum merata turut memengaruhi tingkat pemanfaatan teknologi di kalangan UMKM. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menentukan kesiapan pelaku usaha dalam memahami, memilih, dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan usahanya. Dengan demikian, keterbatasan literasi digital dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses adaptasi dan transformasi digital UMKM.

Teras Bali News (2025) melaporkan bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali menyatakan meskipun jumlah UMKM di Bali terus bertambah, tingkat digitalisasi masih relatif rendah karena kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital belum berkembang secara merata. Rendahnya literasi digital, khususnya pada pelaku usaha mikro, menjadi penghambat utama dalam proses *onboarding* ke dalam ekosistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital bukan semata-mata berkaitan dengan penyediaan akses terhadap teknologi, tetapi juga menyangkut kapasitas pelaku usaha dalam memahami, mengadopsi, dan memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan usaha tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan laporan Radar Buleleng (2025) yang menyebutkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Bali yang belum melek digital sehingga pemanfaatan teknologi, baik untuk pemasaran maupun pengelolaan usaha, masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan literasi digital bukan hanya terjadi pada kelompok usaha tertentu, melainkan menjadi tantangan yang masih dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM di berbagai wilayah di Bali. Dengan demikian, rendahnya tingkat digitalisasi tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual, tetapi merupakan fenomena yang lebih luas dan memerlukan pendekatan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas digital pelaku usaha secara bertahap.

Selain aspek kompetensi, transformasi digital juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha untuk mengubah pola pengelolaan bisnis. Perubahan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital menuntut kemampuan baru, seperti pengelolaan pemasaran digital, transaksi elektronik, pencatatan keuangan digital, hingga pengelolaan identitas merek melalui media sosial. Ketika kemampuan tersebut

belum dimiliki secara memadai, adopsi teknologi cenderung berlangsung secara lambat meskipun berbagai platform digital telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada dasarnya merupakan proses perubahan cara kerja dan pola pikir (*mindset*) pelaku usaha, bukan sekadar penggunaan perangkat atau aplikasi digital.

Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat transformasi digital UMKM. ANTARA News (2025) melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong digitalisasi melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, *marketplace*, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam penguatan pemasaran digital dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, berbagai upaya tersebut masih memerlukan dukungan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjangkau pelaku UMKM dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda-beda. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diselenggarakan, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan riil pelaku usaha.

Selain pemerintah, perguruan tinggi juga mulai mengambil peran dalam mempercepat transformasi digital UMKM. Primakara University (2024) melaksanakan program pendampingan bisnis dan digitalisasi UMKM dengan menerjunkan mahasiswa untuk mendampingi pelaku usaha dalam pemanfaatan *marketplace*, pemasaran digital, pembukuan digital, serta pengembangan strategi bisnis berbasis teknologi. Program tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung mampu membantu pelaku UMKM memahami sekaligus mengimplementasikan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan usahanya. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses transformasi digital memerlukan pendampingan yang berkelanjutan sehingga pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, paradoks transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya keterhubungan antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program pendampingan, dan implementasi kebijakan yang telah berjalan. Dengan demikian, transformasi digital perlu dipandang sebagai persoalan ekosistem yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga pelaku usaha itu sendiri. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan teknologi maupun pelatihan yang bersifat umum, tetapi memerlukan pendekatan kebijakan yang

lebih terintegrasi, adaptif, dan sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing pelaku UMKM. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai kesenjangan dalam implementasi kebijakan transformasi digital yang telah berjalan di Provinsi Bali.

Kebutuhan Perubahan Desain Kebijakan Transformasi Digital UMKM

Berbagai temuan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi, serta belum optimalnya pemanfaatan ekosistem digital menunjukkan bahwa persoalan transformasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis mengenai penggunaan teknologi. Sebaliknya, transformasi digital merupakan proses perubahan yang melibatkan aspek manusia, organisasi usaha, dan lingkungan kebijakan secara bersamaan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya program yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM.

Pada sisi lain, berbagai inisiatif untuk mempercepat transformasi digital sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Bali, misalnya, telah mendorong digitalisasi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia, *marketplace*, lembaga jasa keuangan, serta berbagai institusi lainnya dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan penguatan pemasaran digital. Perguruan tinggi juga mulai berkontribusi melalui program pendampingan UMKM, sebagaimana dilakukan oleh Primakara University (2024) yang melibatkan mahasiswa dalam mendampingi pelaku usaha memanfaatkan *marketplace*, pemasaran digital, pembukuan digital, serta pengembangan strategi bisnis berbasis teknologi. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi agenda bersama yang memperoleh dukungan dari berbagai aktor. Namun, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, capaian digitalisasi UMKM di Bali masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan transformasi digital bukan semata-mata terletak pada minimnya jumlah program yang diselenggarakan, melainkan juga pada pendekatan kebijakan yang digunakan dalam mengimplementasikan program-program tersebut. Pelatihan, pendampingan, maupun sosialisasi yang diberikan secara umum berpotensi menghasilkan intervensi yang seragam, sementara pelaku UMKM memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan

bukan hanya bagaimana memperluas jangkauan program, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kondisi kelompok sasaran.

Keragaman kondisi tersebut terlihat dari tingkat pemanfaatan teknologi digital yang berbeda-beda pada setiap pelaku usaha. Sebagian UMKM masih berada pada tahap awal, yaitu belum memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Sebagian lainnya telah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan, tetapi belum memanfaatkannya untuk mendukung proses bisnis lainnya. Di sisi lain, terdapat pula UMKM yang telah menggunakan sistem pembayaran digital (*cashless payment*), aplikasi pembukuan digital, maupun *marketplace* sebagai saluran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukanlah kondisi yang bersifat dikotomis antara "sudah digital" dan "belum digital", melainkan merupakan proses yang dapat berlangsung pada tingkat dan aspek usaha yang berbeda.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rumati *et al.* (2025) mengenai digitalisasi UMKM di Kabupaten Badung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital belum berlangsung secara merata pada seluruh aspek usaha. Digitalisasi relatif lebih banyak diterapkan pada administrasi keuangan dan pemasaran, sementara penerapannya pada aspek sumber daya manusia dan *customer relationship management* masih relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa suatu UMKM dapat telah memanfaatkan teknologi pada aspek tertentu, tetapi belum tentu memiliki tingkat digitalisasi yang sama pada aspek usaha lainnya. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya melihat transformasi digital berdasarkan tingkat dan bentuk pemanfaatan teknologi, bukan sekadar berdasarkan status apakah suatu UMKM telah menggunakan teknologi digital atau belum.

Perbedaan kondisi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap penyusunan kebijakan. UMKM yang belum pernah memanfaatkan teknologi digital tentu memerlukan pengenalan dasar mengenai literasi digital dan penggunaan perangkat sederhana. Sebaliknya, UMKM yang telah aktif menggunakan media sosial dapat diarahkan pada penguatan strategi pemasaran digital, optimalisasi konten, atau pemanfaatan *marketplace*. Sementara itu, UMKM yang telah menggunakan pembayaran digital dan aplikasi pembukuan memiliki kebutuhan yang lebih lanjut, seperti integrasi data usaha, analisis penjualan, pemanfaatan data pelanggan, maupun pengembangan strategi bisnis berbasis teknologi. Dengan demikian, pemberian bentuk pelatihan yang sama kepada seluruh UMKM berpotensi mengurangi efektivitas program karena tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan perubahan dalam desain kebijakan transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Perubahan tersebut

tidak diarahkan pada penambahan jumlah program digitalisasi, melainkan pada perubahan cara pemerintah menyusun dan menyalurkan program tersebut. Kebijakan transformasi digital perlu diawali dengan pemetaan terhadap tingkat kesiapan digital setiap UMKM sehingga bentuk intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, pelatihan, pendampingan, maupun bentuk dukungan lainnya dapat diarahkan secara lebih spesifik sesuai dengan posisi UMKM dalam proses transformasi digital.

Atas dasar hasil analisis tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kebijakan transformasi digital UMKM berbasis Profil Kesiapan Digital. Kerangka kebijakan ini merupakan hasil sintesis konseptual dari berbagai temuan yang menunjukkan bahwa efektivitas transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diselenggarakan, tetapi juga oleh kesesuaian antara bentuk intervensi dengan kondisi pelaku usaha. Profil Kesiapan Digital UMKM diposisikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan sehingga pemerintah memiliki acuan yang lebih sistematis untuk menentukan prioritas program, bentuk pendampingan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi transformasi digital.

Kerangka kebijakan yang diusulkan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penilaian yang bersifat administratif, melainkan sebagai pendekatan konseptual untuk membantu pemerintah memahami posisi setiap UMKM dalam proses transformasi digital. Melalui kerangka tersebut, UMKM tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang homogen, tetapi sebagai pelaku usaha yang memiliki tingkat kesiapan dan kebutuhan digital yang beragam. Informasi mengenai tingkat kesiapan tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai, mulai dari penguatan literasi digital, pendampingan pemanfaatan platform digital, pengembangan sistem transaksi dan pembukuan digital, hingga dukungan untuk integrasi teknologi yang lebih lanjut. Dengan demikian, kerangka ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program digitalisasi melalui pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi pelaku UMKM.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM sektor ekonomi kreatif di Provinsi Bali masih menghadapi paradoks antara besarnya potensi ekonomi kreatif dengan rendahnya tingkat adopsi teknologi digital. Meskipun Bali memiliki ribuan pelaku usaha ekonomi kreatif dan berbagai program digitalisasi telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, tingkat *onboarding* UMKM ke dalam ekosistem digital masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

transformasi digital tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi maupun jumlah program yang diselenggarakan, tetapi juga oleh kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital serta kesesuaian pendekatan kebijakan yang diterapkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam cenderung kurang efektif karena belum mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan digital setiap UMKM. Padahal, pelaku usaha berada pada tahapan transformasi digital yang beragam, mulai dari belum memanfaatkan teknologi digital, menggunakan media sosial untuk pemasaran, hingga mengintegrasikan pembayaran digital dan aplikasi pengelolaan usaha. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap UMKM memiliki kebutuhan intervensi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan kerangka kebijakan transformasi digital UMKM berbasis Profil Kesiapan Digital sebagai pendekatan konseptual untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kerangka ini menempatkan pemetaan tingkat kesiapan digital sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi, pendampingan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga program transformasi digital dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelaku UMKM. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka kebijakan yang menekankan pentingnya diferensiasi intervensi berdasarkan tingkat kesiapan digital, bukan sekadar peningkatan jumlah program digitalisasi.

REFERENSI

- Agussetianingsih, B., & Kasim, A. (2021). *Peran desain kebijakan: Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 167–186.
- Alicia, A. P. N., Purnamawati, I. G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2026). Analisis pengadaan barang dan jasa berbasis e-Katalog dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 7(1), 32–39. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v7i1.485>.
- Angraini, D., Riady, Y., Putimasurai, P., Pratama, A., Sadria, A., & Rosmiati. (2025). *Transformasi digital dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia: Sebuah tinjauan sistematis*. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(2).
- Ayupijaya, M. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(3), 151–168.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (2023). *Data usaha ekonomi kreatif tahun 2023*. Pemerintah Provinsi Bali.
- Handayani, A. D. (2023). Digitalisasi UMKM: Peningkatan kapasitas melalui program literasi digital. *Jurnal Signal*, 11(1), 103–117.

- Hapiz, M., Septia, L. P., Aprilianti, D., Aprilianto, D., Maulida, I., Muhammad, F., Shaafia, A., Maulana, M. H., & Herdiana, D. (2025). *Analisis kebijakan pengembangan UMKM digital di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(5), 36–44.
- Linder, S. H., & Peters, B. G. (1984). *From social theory to policy design*. *Journal of Public Policy*, 4(3), 237–259.
- Pampur, M. N. (2025, June 11). *Duh, ternyata masih banyak pelaku UMKM di Bali yang tak melek digital*. Radar Buleleng. <https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2506110015/duh-ternyata-masih-banyak-pelaku-umkm-di-bali-yang-tak-melek-digital>
- Primakara University. (2024, January 30). *Prime-U gelar pendampingan digitalisasi UMKM gratis*. <https://primakara.ac.id/blog/technopreneurship/pendampingan-umkm-gratis>
- Ramadhany, R., Halim, A., Ulfah, S. M., Palupi, M. P., & Pebrian, A. (2026). *Analisis kebijakan ekonomi digital Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan: Perspektif inklusi digital dan transformasi UMKM*. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 307–322
- Redaksi. (2025, April 28). *Rendahnya literasi digital jadi penghambat UMKM di Bali naik kelas*. Teras Bali News. <https://terasbalinews.com/rendahnya-literasi-digital-jadi-penghambat-umkm-di-bali-naik-kelas/>
- Rhismawati, N. L. (2024, 16 Maret). *Universitas Primakara terjunkan mahasiswa dampingi digitalisasi UMKM di Bali*. ANTARA News Bali. <https://bali.antaranews.com/berita/340611/universitas-primakara-terjunkan-mahasiswa-dampingi-digitalisasi-umkm-di-bali>
- Rumiati, I. G. A. N. L., Utami, N. M. S., Anggarari, A. A., Tripayana, S., & Yasa, I. G. S. P. (2025). Optimization of MSME digitalization in Badung Regency. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 6(2), 166–177.
- Saputra, H.N. (2023, November 21). *Tantangan digitalisasi UMKM di Bali mendesak diatasi bersama*. Bisnis.com. <https://bali.bisnis.com/read/20231121/537/1716561/tantangan-digitalisasi-umkm-di-bali-mendesak-diatasi-bersama>
- Schneider, A., & Ingram, H. (1990). *Behavioral assumptions of policy tools*. *The Journal of Politics*, 52(2), 510–529.
- Sumartana, I. M., Widnyani, I. A. P. S., Dewi, C. I. D. L., Indramanik, I. B. G., & Utama, I. G. B. R. (2024). Inovasi pengembangan usaha Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Sulang, Klungkung. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 5(1), 19–30.